



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil (*Outcome*), serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, diperlukan indikator kinerja utama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan/sasaran strategis organisasi.

BAB II
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

IKU di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) IKU disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) IKU disusun dengan memperhatikan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
EVALUASI
Pasal 4

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan rewiu dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah diberikan tugas untuk melakukan rewiu dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 060/008/K-I/2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale.
pada tanggal 04 Januari 2022

BUPATI TANA TIDUNG,

HX

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 Januari 2022

.....G9?F9H5F-G'859F5< ?'56I D5H9B'H5B5'H8I B;

.....HX

.....G5-8'5; =@

.....69F-H5'859F5< ?'56I D5H9B'H5B5'H8I B; 'H5<I B'&&&'BCA CF '*

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR.....6..... TAHUN ..2022...
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KETENTUAN DALAM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, sehingga pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat harus mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjamin anggaran tepat sasaran. Artinya bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memberikan manfaat untuk masyarakat utamanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila pelaksanaan pemerintahan berorientasi pada hasil (result oriented government). Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal perencanaan sarannya harus jelas, indikator/alat ukur dan targetnya juga jelas. Untuk itu, SAKIP perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan IKU. Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah Daerah dan OPD) sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya IKU ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan/sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan IKU, karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program/kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Tana Tidung, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan IKU ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Diharapkan IKU ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja instansi/aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI TANA TIDUNG

HX

IBRAHIM ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 6... TAHUN 2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
1	Mewujudkan Masyarakat yang unggul dan berdaya saing menuju KTT PINTAR dan KTT SEHAT	1.1 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan sebagai wujud KTT Pintar	Indeks Pembangunan Manusia	-	68,42	68,84	69,26	69,68	70	$\sqrt[3]{\frac{Pendidikan \times Kesehatan \times IPengeluaran}{3}} \times 100$	Perhitungan IPM didapatkan dari perhitungan tiga komponen yaitu ; - Perhitungan Indeks Pendidikan yang didapatkan dari pelajar usia 7-18 tahun (data harapan lama sekolah siswa yang menempu pendidikan formal/non formal se-tingkat SD sampai melanjutkan perguruan tinggi Kab.Tana Tidung dalam satu Tahun) dibagi dua. - Perhitungan Indeks kesehatan didapatkan dari usia harapan hidup laki-laki ditambah dengan usia harapan hidup perempuan Kabupaten Tana Tidung dibagi dua. - Perhitungan Indeks pengeluaran didapatkan dari rata-rata PDRB Domestik bruto dari pengeluaran rumah tangga Kab.Tana Tidung dalam satu tahun.	BPS - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Dinas Pertanian Pangan, dan Perikanan 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM 7. Dinas PUPR/PPK 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4										
		1.1 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan sebagai wujud KTT Pintar	Indeks Pendidikan	-	63,45	63,87	64,28	64,70	65,11	$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$ <p>HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata - rata Lama Sekolah</p>	- Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan menghitung HLS tahun n dikurang dengan HLS minimal, dibagi dengan HLS maksimal dikurang dengan HLS minimal - Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan menghitung RLS tahun n dikurang dengan RLS minimal, dibagi dengan RLS maksimal dikurang RLS minimal.	BPS - Dinas Pendidikan	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4. Dinas PU Ciptakarya, Perumahan dan Permukiman 5. Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4							5	6	7	8
			Indeks Pembangunan Gender	-	79,04	79,36	79,69	80,01	80,34	$\text{Indeks Gender} = \frac{\text{IPM Perempuan Tahun } n}{\text{IPM Laki-laki Tahun } n}$	<p>- Perhitungan IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living).</p> <p>- Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.</p>	<p>- BPS</p> <p>- SKPD Terkait</p>	<p>Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Koordinator : Bappeda</p> <p>SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) :</p> <p>1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM</p>
		1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud KTT Sehat	Indeks Kesehatan	-	79,41	79,53	79,66	79,79	79,92	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{UHH Tahun } n - \text{UHH minimal}}{\text{UHH Maks} - \text{UHH minimal}}$ <p>UHH : Usia Harapan Hidup</p>	<p>- Perhitungan Indeks kesehatan didapatkan dari usia harapan hidup laki-laki ditambah dengan usia harapan hidup perempuan Kabupaten Tana Tidung dibagi dua.</p>	<p>BPS</p> <p>- Dinas Kesehatan</p> <p>- RSUD</p>	<p>Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Koordinator : Bappeda</p> <p>SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) :</p> <p>1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Dinas PUPR/PPK 4. Dinas Perhubungan</p>

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
2	Menyediakan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas Menuju KTT TERANG dan KTT ADA		Indeks Kualitas Infrastruktur	-	70,00	72,5	75,0	77,5	80,0	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga + 40% Indeks Infrastruktur SDA + 10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Data Jalan dalam kondisi Mantap dan PJU (bina marga), Data saluran pengairan dan drainase (SDA), jumlah bangunan gedung pemerintah (Cipta Karya)	BPS - Dinas PUPRPKP	Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas PUPRPKP 2. Dinas Perhubungan
		2.1 Meningkatkan kualitas perumahan masyarakat dan ketersediaan air bersih sebagai wujud KTT ADA	Rasio Rumah Layak Huni	%	83,71	85,29	86,86	88,43	90,00	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni Tahun } n}{\text{Jumlah Rumah Layak Huni Tahun } n-1} \times 100\%$	- Berdasarkan Permenpupr RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni : - Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. - Kecukupan luas minimum 7,2 m ² – 12 m ² /orang - Kriteria Rumah Layak Huni (RLH) tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun kriteria rumah layak huni.	BPS - Dinas PUPRPKP - Kecamatan	Penanggungjawab : Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas PUPRPKP 2. Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4						5	6	7	8	
		2.2 Meningkatnya jaringan listrik/ penerangan dan kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi sebagai wujud KTT TERANG	Indeks Konektivitas Wilayah	-	65,0	67,5	70,0	72,5	75,0	$\frac{\text{Jumlah jalan dalam kondisi baik yang terbangun}}{\text{Jumlah panjang jalan penghubung yang dibutuhkan akses desa /kecamatan}} \times 100\%$	Menghitung seluruh akses jalan yang telah dibangun di setiap desa yang dapat terkoneksi dengan pusat kota	-Dinas PUPRPKP	Penanggungjawab : Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas PUPRPKP 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika
			Rasio Elektrifikasi	-	99,97	99,98	99,99	100	100	$\frac{\text{Jumlah Desa terhubung Listrik Tahun n}}{\text{Jumlah Desa Belum terhubung Listrik}} \times 100\%$	Menghitung seluruh Desa yang terhubung aliran listrik	-Dinas PUPRPKP - PLN - BPS	Penanggungjawab : Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas PUPRPKP
3	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal menuju KTT BERDAYA		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-	0,75	1,50	2,25	3,00	4,00	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Angka Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan prosentase PDRB ADHK 2010 tahun n, PDRB ADHK 2010 tahun n-1 dan PDRB ADHK 2010 tahun n-1	- BPS	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Penanaman Modal, dan PTSP 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas PUPRPKP 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
		3.1 Meningkatnya Sektor Pertanian Daerah	LPE Kategori Pertanian	-	0,32	0,33	0,50	0,51	0,55	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian Tahun (n)} - \text{PDRB Sektor Pertanian Tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Angka Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan prosentase PDRB Pertanian	-BPS -Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Penanaman Modal, dan PTSP 2. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 3. Dinas PUPRPKP 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian Kerakyatan	LPE Kategori Industri Pengolahan	-	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	$\frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun (n)} - \text{PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Angka Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan prosentase PDRB Pengolahan	-BPS	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Penanaman Modal, dan PTSP 2. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 3. Dinas PUPRPKP 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
		3.3 Meningkatnya Potensi dan Daya Tarik Pariwisata	LPE Sektor Rekreasi dan Budaya	-	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	$\frac{\text{PDRB Sektor Industri Parekraf Tahun (n)} - \text{PDRB Sektor Industri Parekraf Tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Industri Parekraf Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Angka Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan prosentase PDRB ADHK Pariwisata, Hotel, dan Parekraf	- BPS - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Disperindagkop	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Penanaman Modal, dan PTSP 2. Dinas Pariwisata, dan Pemuda Olahraga 3. Dinas PUPRPKP 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Penurunan Tingkat Kemiskinan	%	4,37	4,16	3,94	3,72	3,50	Nilai / Indeks/ Analisa Kemiskinan yang dihitung per tahun	Angka Kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS	- BPS - Dinas Sosial dan PMD - Kecamatan	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Penanaman Modal, dan PTSP 2. Dinas Pariwisata, dan Pemuda Olahraga 3. Dinas PUPRPKP 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 6. Dinas Sosial dan PMD

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
		4.1 Meningkatnya pemerataan kapasitas perekonomian masyarakat	Indeks Gini	-	0,255	0,250	0,245	0,235	0,225	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$ GR = Koefisien Gini F _{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F _{ci} = Frekuensi kumulatif ari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F _{ci-1} = Frekuensi kumulatif ari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)	Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) didapatkan dari publikasi BPS	- BPS - Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 2. Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM 3. Dinas Sosial dan PMD
			PDRB per Kapita	Juta Rp	228,25	235,25	241,90	248,20	254,20	$\frac{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n)} - \text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Angka PDRB didapatkan dari Publikasi BPS	-BPS - Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM - Kecamatan	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Penanaman Modal, dan PTSP 2. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 3. Dinas PUPR/PPK 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 6. Bagian Perekonomian dan Kesra

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
		4.2 Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	3,97	3,81	3,66	3,50	(jumlah angkatan kerajumlah yang bekerja) /jumlah angkatan kerja x 100%	Jumlah angkatan kerja diperoleh dari BPS : Survey Angkatan Kerja Nasional Jumlah angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran Jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) yang bekerja	- BPS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Kecamatan	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 4. Bagian Perekonomian dan Kesra
5	Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	72,99	72,99	72,99	72,99	72,99	(30% x IKU) + (30% x IKA) + (40% x IKTL) IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dari komponen Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Vegetasi (persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kabupaten Tana Tidung)	- Kementerian Lingkungan Hidup - LSM (WWF) - Dinas Lingkungan Hidup	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
		5.1 Terwujudnya Ketahanan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	-	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	Indek Kualitas Air Tahun $n \times 0,376$	<ul style="list-style-type: none"> Data IKA diperoleh dari hasil pengujian terhadap 7 parameter kualitas air, yaitu : BOD, COD, DO, fecal coli, total coliform, phosphat, TSS Pengambilan sampel terhadap : 4 sungai (Sungai Sesayap, Sungai Betayau, Sungai Bandan Bikis dan Sungai Sedulun). Pada setiap sungai terdapat 5 titik pengambilan sampel. Sampel diambil setiap bulan dalam 1 tahun (12 kali) - Total jumlah sampel : $7 \times 4 \times 5 = 140$ sampel / bulan Perhitungan IKA untuk 1 tahun dihitung dari seluruh sampel parameter kualitas air. 	- Kementerian Lingkungan Hidup - LSM (WWF) - Dinas Lingkungan Hidup	Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3. Dinas PUPR/ PKP
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	72,80	72,81	72,82	72,83	72,84	$100 - \{[(84.3 - (\text{Lahan} / \text{Luas Wilayah} \times 100)) \times (50 / 54.3)]\}$	<ul style="list-style-type: none"> Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keaneekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). 		
6	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di seluruh desa menuju Desa CERMAT		Indeks Desa Membangun	-	0,6735	0,691	0,699	0,708	0,725	$\frac{\text{IKE} + \text{IKS} + \text{IKL}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$	- Kemendes - Dinsos PMD Prov Kaltara - Dinsos PMD	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
		6.1 Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa sebagai wujud Desa CERMAT (Cerdas, Mandiri, dan Terintegrasi)	Jumlah Status Desa Mandiri	Desa	1	1	2	2	3	Jumlah Status Desa Mandiri yang dikeluarkan oleh KEMENDES RI	Identifikasi desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75	- Kemendes -Dinsos PMD Prov Kaltara - Dinsos PMD	Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 4. Kecamatan
7	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI		Indeks Reformasi Birokrasi	NILAI	71	72	73	74	75	Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh KEMENPAN RB	Indek Reformasi Birokrasi atas pemenuhan delapan Area Perubahan : 1. Manajemen Perubahan (implementasi penguatan nilai-nilai perubahan/reform) 2. Deregulasi Kebijakan Perundang – undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi (Penyederhanaan Birokrasi dan Struktur Organisasi) 4. Penataan Tatalaksana (Indeks SPBE, Proses Bisnis, dan Implementasi Kearsipan) 5. Penataan SDM Aparatur (Indeks Profesionalisme ASN, Merit System, Tatakelola ASN) 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (SAKIP dan Manajemen Kinerja) 7. Penguatan Pengawasan (Penguatan SPIP, dan Kompetensi APIP) 8. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik, dan Hasil SKM)	- KEMENPANRB - Bagian Organisasi	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi 3. Semua OPD
		7.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah sebagai wujud DIGITALISASI BIROKRASI	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	BB	BB	BB	BB	Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh KEMENPAN RB	Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tana Tidung atas Implementasi SAKIP	- Inspektorat Kabupaten Tana Tidung	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN		
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR	
1	2	3	4						5	6	7	8		
		7.2 Meningkatnya kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	81,50	82	82,50	83	83,50	$IKM = \frac{\sum \text{Rata-rata Nilai SKM OPD}}{\sum \text{Jumlah OPD Melakukan SKM}}$	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal dihitung dari Jumlah skor IKM semua OPD (Bagian, Dinas, Kecamatan, dan Sekolah) dibagi dengan jumlah layanan	- Bagian Organisasi	Penanggungjawab : 1. Asisten Pembangunan dan Administrasi Umum 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi 3. Semua OPD	
8	Meningkatkan Konduktivitas pembangunan wilayah		Indeks Rasa Aman	-	70	72,5	75	77,5	80	"Identifikasi Resiko Bencana/ Kriminalitas Pemenuhan Kesiap Siagaan Bencana"	Pengumpulan Data dari BPBD	- BPBD	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Kecamatan 5. Pemerintah Desa	
		8.1	Meningkatnya perlindungan Masyarakat	Angka Kriminalitas	Per 10.000 Penduduk	5,86	5,64	5,43	5,21	5,00	$\text{Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Angka Kejahatan Tahun n}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Angka Kriminalitas yang dihitung BPS dan OPD Terkait	BPS - Kantor Satpol PP	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda
		8.2	Meningkatnya kualitas penanganan bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	-	160	155	150	145	140	50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi	Pengumpulan Data dari BPBD	- BPBD	SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Kecamatan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
1. Dinas Pendidikan													
1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	1.1 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan sebagai wujud KTT Pintar	Angka harapan lama sekolah	NILAI	63,45	63,87	64,28	64,70	65,11	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-24 yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-24 tahun}}$	Angka partisipasi sekolah dihitung dari Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia sekolah, dikalikan 100%	BPS	- Bidang Pendidikan Dasar - Bidang PAUD dan Non Formal
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	NILAI	63,45	63,87	64,28	64,70	65,11	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ketas x Lama pendidikan yang dijalani}}{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ketas yang telah menyelesaikan pendidikan/berijasah}}$	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan atau jumlah hasil perkalian jumlah penduduk dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani dibagi jumlah penduduk	-Kemendikbud RI -Dinas Pendidikan KTT	- Bidang Pendidikan Dasar - Bidang PAUD dan Non Formal
			Precentage Sertifikasi Tenaga Pendidik DIKDAS, PAUD	Nilai	16,2	17,9	20,4	23	25,5	$\frac{\text{Jumlah Rata -Rata Tendik terakreditasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Tendik}}$	Menghitung seluruh Pendidik ASN yang tersertifikasi tingkat PAUD, SD, dan SMP disandingkan dengan seluruh tendik Kabupaten Tana Tidung	-Kemendikbud RI -Dinas Pendidikan KTT	- Bidang Pendidikan Dasar - Bidang PAUD dan Non Formal
			Angka Putus Sekolah Jenjang DIKDAS	%	0	0	0	0	0	$\frac{\text{(Jumlah siswa putus sekolah / Jumlah keseluruhan siswa DIKDAS)} \times 100\%}{}$	Angka Putus Sekolah siswa SD dan SMP dihitung dari jumlah siswa DIKDAS dibagi jumlah siswa sekolah, dikalikan 100%	-Kemendikbud RI -Dinas Pendidikan KTT	- Bidang Pendidikan Dasar
			Angka Kelulusan jenjang DIKDAS	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{(Jumlah kelulusan siswa / Jumlah jumlah keseluruhan siswa)} \times 100\%}{}$	Angka Kelulusan siswa SD dan SMP dihitung dari jumlah siswa DIKDAS dibagi jumlah kelulusan siswa sekolah, dikalikan 100%	-Kemendikbud RI -Dinas Pendidikan KTT	- Bidang Pendidikan Dasar
			Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD	%	68	71	74	77	80	$\frac{\text{(Jumlah siswa PAUD / Jumlah penduduk usia 1-7 thn)}} \times 100\%$	Angka partisipasi kasar PAUD dihitung dari jumlah siswa PAUD dibagi jumlah penduduk usia 1 - 7 tahun, dikalikan 100%	-Kemendikbud RI -Dinas Pendidikan KTT	- Bidang Pendidikan Dasar - Bidang PAUD dan Non Formal
			Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang DIKDAS	%	95,6	96	96,5	97	97,5	$\frac{\text{(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 thn)}} \times 100\%$	Angka partisipasi kasar SD dihitung dari jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun, dikalikan 100%	-Kemendikbud RI -Dinas Pendidikan KTT	- Bidang Pendidikan Dasar

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
			Presentase Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum DIKDAS	Nilai	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1	Jumlah Rata-Rata Nilai Siswa Dikdas dibandingkan dengan Nilai Siswa Nasional	Rata-rata Nilai Mata Pelajaran Dasar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA siswa SD dan SMP Kabupaten Tana Tidung	-Kemendikbud RI -Dinas Pendidikan KTT	-Bidang Pendidikan Dasar
			Presentase Cakupan Buta Aksara yang dibina dan mengikuti pendidikan literasi	%	20	40	60	80	100	(Jumlah Buta Aksara Kabupaten / Jumlah Buta Aksara yang dibina pendidikan literasi) x 100%	Rata-rata Masyarakat Buta Aksara per Desa Kabupaten Tana Tidung yang telah dibina untuk mengikuti pelatihan non formal kecakapan hidup	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang Pendidikan Dasar -Bidang PAUD dan Non Formal -Bidang Kebudayaan
			Presentase Akreditasi Sekolah Minimal B Jenjang DIKDAS	%	89	92	94	97	100	Jumlah Peringkat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional	Rata-rata jumlah sekolah Tingkat SD dan SMP Tana Tidung yang telah mendapatkan Akreditasi sekolah di bagi dengan jumlah sekolah	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang Pendidikan Dasar -Bidang PAUD dan Non Formal
			Presentase Akreditasi Sekolah Minimal B Jenjang PAUD	%	39	42	50	58	66	Jumlah Peringkat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional	Rata-rata jumlah sekolah Tingkat PAUD Tana Tidung yang telah mendapatkan Akreditasi sekolah di bagi dengan jumlah sekolah	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang Pendidikan Dasar -Bidang PAUD dan Non Formal

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan OPD	%	79	80	81	82	84	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal dihitung dari Jumlah skor IKM semua OPD (Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD) dibagi dengan jumlah layanan	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang Umum Kepegawaian
			Predikat LAKIP OPD (Dengan satuan : Huruf)	Predikat	CC	B	B	B	BB	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat atas Implementasi SAKIP	-Dinas Pendidikan KTT	- Sub Bagian Program dan Keuangan
			Precentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	%	70	75	78	80	80	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	-Dinas Pendidikan KTT	- Sub Bagian Program dan Keuangan
			Precentase tenaga pendidik jenjang DIKDAS berkualifikasi S1/D-IV	%	74	79	84	90	97	(Jumlah Tendik berkualifikasi S1/D-IV / Jumlah seluruh Tendik SD/SMP) x 100%	jumlah Tendik status PNS/Honoror berkualifikasi S1/D-IV sekolah SMP dibagi dengan Jumlah seluruh Tenaga Kependidikan SD/SMP dikali 100%	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang DIKDAS
			Precentase tenaga pendidik jenjang PAUD berkualifikasi S1/D-IV	%	20	25	29	39	50	(Jumlah Tendik berkualifikasi S1/D-IV / Jumlah seluruh Tendik PAUD) x 100%	jumlah Tendik status PNS/Honoror berkualifikasi S1/D-IV sekolah PAUD dibagi dengan Jumlah seluruh Tenaga Kependidikan PAUD dikali 100%	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang PAUD
			Precentase Sekolah DIKDAS yang menerapkan kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Kesenian Daerah	%	11	28	50	75	100	(Jumlah Implementasi Kurikulum Mulok di sekolah / Jumlah Sekolah SD/SMP) x 100%	menghitung keseluruhan Implementasi Kurikulum Mulok yang tersedia di sekolah SD-SMP dibagi Jumlah Sekolah SD/SMP x 100%	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang Kebudayaan
			Precentase Sekolah TK yang menerapkan kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Kesenian Daerah	%	0	22	44	67	100	(Jumlah Implementasi Silabus RPP Mulok di sekolah / Jumlah Sekolah PAUD) x 100%	menghitung keseluruhan Implementasi RPP Silabus yang tersedia di sekolah PAUD dibagi Jumlah Sekolah SD/SMP x 100%	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang Kebudayaan
			Precentase Siswa SD dan SMP yang mampu berbahasa daerah	%	5	10	20	30	40	(Jumlah Siswa SD SMP yang mampu berbahasa Daerah / Jumlah Seluruh Siswa) x 100%	menghitung keseluruhan penggunaan bahasa daerah/sastra daerah di Sekolah Sekolah dibagi Jumlah Sekolah SD/SMP x 100%	-Dinas Pendidikan KTT	-Bidang Kebudayaan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
2. Dinas Kesehatan													
1	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud KTT Sehat	Indeks Kesehatan	-	79,41	79,53	79,66	79,79	79,92	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{UHH Tahun } n - \text{UHH minimal}}{\text{UHH Maks} - \text{UHH minimal}}$ UHH : Usia Harapan Hidup	menghitung jumlah usia harapan hidup jenis kelamin laki-laki dan perempuan tahun berjalan dikurang dengan usia harapan hidup terkecil, dibandingkan dengan usia harapan hidup maksimal	- BPS - Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	7	6,5	6	5,5	5	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun	menghitung angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kab Tana Tidung	- Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran	per 1.000 kelahiran hidup	5,5	5	4,5	4	4	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Neonatal) per 1.000 Kelahiran dalam satu tahun	Menghitung angka Kematian Ibu Melahirkan (Neonatal) per 1.000 Kelahiran dalam satu tahun di Kabupaten Tana Tidung	- Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95	95,5	96	96,5	96,8	Rata-rata jumlah tenaga kesehatan dibagi dengan persebaran disetiap kecamatan	menghitung rata-rata jumlah tenaga kesehatan dibagi dengan persebaran disetiap kecamatan	- Dinas Kesehatan	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95	95	95	95	95	Jumlah Fasilitas kehamilan K4 di setiap Kecamatan	Jumlah Fasilitas kehamilan K4 di setiap Kecamatan	- Dinas Kesehatan	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
			Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	%	70	75	80	82	85	$\frac{\text{Jumlah Cakupan Desa UCI Tahun } n}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Presentase Desa yang terakses UCI dibagi dengan seluruh jumlah desa dikali 100%	- Dinas Kesehatan	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
			Presentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Faskes yang tersedia}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Presentase pelayanan kesehatan usia produktif di faskes/ penyuluh dibagi dengan seluruh jumlah desa dikali 100%	- Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
			presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pasien Penderita Hipertensi Tahun } n}{\text{Jumlah Pasien Penderita Hipertensi Tahun } n-1} \times 100\%$	data pasien hipertensi yang mendapatkan pelayanan terpadu di Kab Tana Tidung	- Dinas Kesehatan	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pasien Penderita DM Tahun } n}{\text{Jumlah Pasien Penderita DM Tahun } n-1} \times 100\%$	data pasien Diabetes yang mendapatkan pelayanan terpadu di Kab Tana Tidung	- Dinas Kesehatan	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
			presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pasien Penderita ODGJ Tahun } n}{\text{Jumlah Pasien Penderita ODGJ Tahun } n-1} \times 100\%$	data pasien ODGJ yang mendapatkan pelayanan terpadu di Kab Tana Tidung	- Dinas Kesehatan	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
			Presentase Kasus KLB/Berpotensi KLB yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Kasus KLB/ Berpotensi KLB}}{\text{Jumlah Jumlah Kasus KLB/ Berpotensi KLB yang tertangani}} \times 100\%$	data kasus KLB yang mendapatkan pelayanan terpadu di Kab Tana Tidung	- Dinas Kesehatan	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
			Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standard	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pasien Penderita TBC Tahun } n}{\text{Jumlah Pasien Penderita TBC Tahun } n-1} \times 100\%$	data pasien TBC yang mendapatkan pelayanan terpadu di Kab Tana Tidung	- Dinas Kesehatan	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
			Presentase Fasilitas Pelayanan kesehatan Terakreditasi	%	71.43	85.71	85.71	85.71	100	$\frac{\text{Jumlah Faskes Terakreditasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Faskes se Kabupaten}} \times 100\%$	Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi dihitung dari jumlah rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah semua rumah sakit dan	- Dinas Kesehatan	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
			Cakupan Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat memiliki Jamkesmas}}{\text{Jumlah Penduduk se-Kabupaten}} \times 100\%$	data Masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang memiliki kartu Jaminan kesehatan	- Dinas Kesehatan - BPJS	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PELAYANAN KESEHATAN
			Presentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial >85%	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Kecukupan Obat/ Vaksin per-Faskes}}{\text{Jumlah kebutuhan Puskesmas se-Kabupaten}} \times 100\%$	data kebutuhan obat/vaksin yang tersedia pada faskes se-Kabupaten Tana Tidung dibagi dengan kebutuhan dikali 100%	- Dinas Kesehatan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PELAYANAN KESEHATAN
			Presentase Sarana dan Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	70	75	80	85	90	$\frac{\text{Jumlah Kecukupan Saprass Kesehatan sesuai ISO}}{\text{Jumlah saprass Faskes se-Kabupaten}} \times 100\%$	Presentase saprass Rumah Sakit dan Puskesmas yang tersedia dibagi jumlah saprass semua rumah sakit dan puskesmas yang ada Kabupaten Tana Tidung dikali 100%	- Dinas Kesehatan	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
			Presentase ketersediaan SDMK sesuai standar	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Kebutuhan SDMK per Faskes}}{\text{Jumlah Kecukupan Pemenuhan SDMK}} \times 100\%$	Presentase SDMK yang tersedia Kabupaten Tana dibagi dengan kebutuhan SDMK Tidung dikali 100%	- Dinas Kesehatan	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
			Presentase SDMK mendapatkan pelatihan peningkatan Kompetensi	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah SDMK yang telah mengikuti peningkatan kompetensi}}{\text{Jumlah SDMK se-Kabupaten}} \times 100\%$	Presentase SDMK yang tersedia Kabupaten Tana Tidung dibagi dengan SDMK yang telah mendapatkan pelatihan kompetensi dikali 100%	-Dinas Kesehatan	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
			Presentase Pelaksanaan Kampanye Germas	%	20	40	60	80	100	$\frac{\text{Jumlah Sosialisasi Germas per Desa}}{\text{Jumlah Seluruh Desa se-Kabupaten}} \times 100\%$	Presentase sosialisasi germas yang dilakukan dibagi dengan jumlah seluruh desa se-Kabupaten dikali 100%	-Dinas Kesehatan	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PELAYANAN KESEHATAN
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman													
1	Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur sosial	2.1 Meningkatkan kualitas perumahan masyarakat dan ketersediaan air bersih sebagai wujud KTT ADA	Rasio Rumah Layak Huni	%	83.71	85.29	86.86	88.43	90	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni Tahun n}}{\text{Jumlah Rumah Layak Huni n-1}} \times 100\%$	Menghitung jumlah layak huni tahun terbaru data tersebut dibagi dengan jumlah rumah layak huni tahun sebelumnya dikali 100%	Data RTH publik	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Presentase penurunan RTLH di luar kawasan Kumuh	%	92	93	95	96	98	70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Luas kawasan dan sarana prasarana permukiman baik (sudah terpenuhi sarana prasarana dasarnya: jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan); jumlah tangki septik yang tersambung ke IPAL	Data RTH publik	Bidang Tata Ruang
			Jumlah Bangunan SDA	Unit	0	0	1	1	2	Jumlah Bangunan SDA dalam satu tahun	data kumulatif Bangunan Sumber Daya Air di Kabupaten Tana Tidung	Dinas PUPRPKP	Bidang Sumber Daya Air
			Presentase Drainase Kondisi Baik	%	0	15	30	45	60	$\frac{\text{Jumlah Drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Drainase dalam kondisi rusak}} \times 100\%$	Menghitung jumlah Drainase dalam kondisi baik di Kecamatan, dibagi dengan drainase yang rusak dikali 100%	Dinas PUPRPKP	Bidang Sumber Daya Air
			Presentase PSU yang terbangun	%	25	23	21	19	17	$\frac{\text{Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi Rusak}} \times 100\%$	menghitung akumulasi PSU dalam kondisi baik dibagi dengan PSU kondisi rusak dikali 100%	Dinas PUPRPKP	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Presentase Bangunan umum dalam Kondisi Baik	%	77	83	89	95	100	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Umum dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Bangunan Umum Kabupaten}} \times 100 \%$	menghitung jumlah bangunan sebagai fasilitas umum yang digunakan publik dalam kondisi baik/ layak	Dinas PUPRPKP	Bidang Cipta Karya
		2.2 Meningkatnya jaringan listrik/ penerangan dan kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi sebagai wujud KTT TERANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW	%	50	100	100	100	100	Luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW / luas wilayah Kab Tana Tidung	Luas wilayah yang sesuai peruntukan dalam RT/RW dibandingkan dengan luas wilayah Kab Tana Tidung	Dinas PUPRPKP	Bidang Tata Ruang
			Rasio Elektrifikasi		99.97	99.98	99.99	100	100	$\frac{\text{Jumlah Desa Teraliri Listrik Tahun n}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100 \%$	Menghitung rasio elektrifikasi rumah yang mendapatkan akses listrik seluruh Kabupaten Tana Tidung	Dinas PUPRPKP BPS PLN	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM													
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal menuju KTT BERDAYA	3.2 Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian Kerakyatan	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	0.5	1	1.5	2	2.5	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n) - PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n-1) $\frac{\text{PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n)}}{\text{PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Angka Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan prosentase PDRB ADHB 2010 tahun n, PDRB ADHB 2010 tahun n-1 dan PDRB ADHB 2010 tahun n-1	BPS	Bidang Perindustrian
			Presentase peningkatan usaha mikro yang menjadi wira usaha	%	1	2	3	4	5	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro menjadi Wirausaha Tahun n}}{\text{Jumlah Usaha Mikro menjadi Wirausaha Tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100 \%$	Jumlah nilai omset UKM usaha mikro	Disperindagkop UMKM	Bidang Koperasi dan UKM
			Presentase Usaha mikro (Terhadap seluruh UMKM)	%	1	2	3	4	5	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Tahun n}}{\text{Jumlah UMKM Tahun n}} \times 100 \%$	Jumlah nilai omset UKM usaha mikro	Disperindagkop UMKM	Bidang Koperasi dan UKM
			Presentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang dimanfaatkan	%	10	20	30	40	50	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri Tahun n}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Industri yang dimanfaatkan}} \times 100 \%$	Kajian dokumen perencanaan pembangunan industri UMKM Kabupaten Tana Tidung	Disperindagkop UMKM	Bidang Perindustrian

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
5. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga													
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal menuju KTT BERDAYA	3.3	Meningkatnya Potensi dan Daya Tarik Pariwisata	LPE Sektor Rekreasi dan Budaya	%	0.5	1	1.5	2	2.5	$\frac{\text{PDRB Sektor Industri Parekrif Tahun (n)} - \text{PDRB Sektor Industri Parekrif Tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Industri Parekrif Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Angka Pertumbuhan Ekonomi Panenkrif diperoleh dari perhitungan prosentase PDRB ADHK 2010 tahun n, PDRB ADHK 2010 tahun n-1 dan PDRB ADHK 2010 tahun n-1	Disperindagkop UMKM	Bidang Pariwisata
			Jumlah kunjungan wisata mancanegara	Orang	12	15	20	23	25	Jumlah kunjungan wisata mancanegara dalam satu tahun	Jumlah kunjungan wisata mancanegara dalam satu tahun	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Pariwisata
			Jumlah kunjungan wisata Nusantara	Orang	12.000	15.000	20.000	23.000	25.000	Jumlah kunjungan wisata Nusantara dalam satu tahun	Jumlah kunjungan wisata Nusantara dalam satu tahun	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Pariwisata
			Jumlah Destinasi Non Unggulan	Destinasi	7	7	7	7	8	Jumlah Destinasi Non Unggulan dalam satu Tahun	Jumlah Destinasi Non Unggulan dalam satu Tahun	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Pariwisata
			Jumlah Destinasi Unggulan	Destinasi	2	3	3	3	3	Jumlah Destinasi Unggulan dalam satu Tahun	Jumlah Destinasi Unggulan dalam satu Tahun	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Pariwisata
			Tingkat hunian akomodasi	Hari	1	1,5	2	2	2,5	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan yang menginap tahun (n)}}{\text{Jumlah Penginapan/Hotel}} \times 100\%$	Jumlah wisatawan LN, Dalam Negeri yang menginap di Kabupaten Tana Tidung dalam satu tahun	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Pariwisata
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	30	35	40	45	60	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang dilatih menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah pemuda yang dilatih}} \times 100$	Pemuda Wirausaha = Pemuda yang mampu menerapkan hasil dari pelatihannya, bisa menciptakan inovasi dari sebuah karya, dan mampu mengembangkan diri lebih baik lagi serta mampu menerapkan dalam kehidupannya dengan semangat kerja yang tinggi sehingga tingkat kemandirian dalam usaha meningkatkan ekonomi semakin baik Pemuda dilatih = Target pemuda yang dilatih mengikuti pelatihan (dalam tahun berjalan)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Pemuda dan Olahraga

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30	35	40	45	60	$\frac{\text{Jumlah Pemuda pelopor}}{\text{Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan}} \times 100\%$	Pemuda Pelopor = Pemuda bisa menciptakan sesuatu / inovasi dan atau mengubah gagasan menjadi sebuah karya nyata yang diikuti oleh masyarakat luas sehingga mampu berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Bidang Pemuda dan Olahraga
			Peningkatan Prestasi Olahraga	%	50	55	60	65	65	$\frac{\text{Jumlah Prestasi Olahraga Kepemudaan Tahun n}}{\text{Jumlah Prestasi Olahraga Kepemudaan Tahun n-1}} \times 100\%$	Mengukur prestasi pemuda Olahraga usia 10-25 Tahun di Kabupaten Tana Tidung yang dibina dan mendapatkan prestasi olahraga tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan	Bidang Pemuda dan Olahraga

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
1	Mewujudkan Masyarakat yang unggul dan berdaya saing menuju KTT PINTAR dan KTT SEHAT	1.1 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan sebagai wujud KTT Pintar	Indeks Gender / Indeks Pembangunan Gender	-	20	40	60	80	100	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan ----- x 100 % Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki	Indeks keberdayaan masyarakat didapatkan dari prosentase yang diperoleh dari penjumlahan Indeks Desa Membangun, penjumlahan Persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan dan persentase, perempuan dalam kelembagaan.	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			Persentase Jumlah KDRT Data Gender dan Anak	Persen	70	75	80	85	90	(Jumlah korban KDRT anak/ jumlah penduduk anak)*100%	Prevalensi kekerasan terhadap anak dihitung dari jumlah korban KDRT anak dibagi jumlah penduduk anak	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	79.04	79.36	79.69	80.01	80.34	[60% Indeks Desa Membangun Berbasis Desa +{40%(Persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan + persentase perempuan dalam kelembagaan)/2}]*100	untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM Laki-laki, dan IPM perempuan dibentuk atas tiga dimensi dasar yakni umur panjang/sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			Persentase Pengaduan Kekerasan Perempuan yang Tertangani	%	20	40	60	80	100	Jumlah Pengaduan yang masuk dalam satu tahun ----- x 100 % Jumlah Pengaduan yang difasilitasi/ tertangani	kekerasan terhadap perempuan dihitung dari jumlah korban perempuan dibagi jumlah penduduk perempuan	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	4.1 Meningkatnya pemerataan kapasitas perekonomian masyarakat	Indeks Gini per Kecamatan	-	0,257	0,255	0,250	0,245	0,225	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$	f _i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y _i = jumlah kuantitatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya Bila GR = 1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau kelompok saja	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan - BPS	Bidang Sosial

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Presentase PMK yang terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar	%	75	80	85	90	95	40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30% Persentase PSKS yang aktif	PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari : - BNPT - PKH - Anak terlantar - Lansia terlantar - Santunan kematian - Orang terlantar PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial terdiri dari : - KUBE - Penyandang disabilitas - Penyandang sakit jiwa - Korban Tindak Kekerasan/Perempuan Rawan Sosial Ekonomi - Anak Jalanan dan Gelandangan - Pengemis PMKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring terdiri dari : - Karangtaruna - WKSEBM - LKS - TSKS - PSM	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Sosial
3	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di seluruh desa menuju Desa CERMAT	6.1 Meningkatkan Kemajuan dan kemandirian Desa sebagai wujud Desa CERMAT (Cerdas, Mandiri dan Terintegrasi)	Indeks Desa Membangun	-	0,691	0,699	0,708	0,716	0,725	$\frac{\text{IKE} + \text{IKS} + \text{IKL}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$	Komposit dari tiga indikator yakni : - Indeks Ketahanan Ekonomi - Indeks Ketahanan Sosial - Indeks Ketahanan Lingkungan dari 32 Desa se-kabupaten Tana Tidung	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Ketahanan Masyarakat Dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa
			Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	1	2	2	3	Jumlah Status Desa Mandiri Hasil Evaluasi Perhitungan	Jumlah Status Desa Mandiri Hasil Evaluasi Perhitungan	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Ketahanan Masyarakat Dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa
			Presentase Desa Maju	%	20	40	60	80	100	$\frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100 \%$	Desa Maju yakni jumlah komposit IDM yang bernilai 0,8155. nilai tersebut menjadi dasar pengukuran status Desa di Kabupaten Tana Tidung	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Ketahanan Masyarakat Dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa
			Presentase Lembaga Aktif	%	21	41	61	81	100	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Lembaga}} \times 100 \%$	Presentase lembaga Desa yang aktif yang dibina setiap Desa di Kabupaten Tana Tidung	- Dinas Sosial PMD - Kecamatan	Bidang Ketahanan Masyarakat Dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
		4.2 Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas angkatan Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	%	40	40	40	40	40	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Belum Sertifikasi Kompetensi}} \times 100 \%$	Menghitung jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi pada angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung, dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang belum bersertifikasi	- BPS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Ketenagakerjaan
			Presentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	40	40	40	40	40	$\frac{\text{Total Keluaran Produk}}{\text{Total Masukan (Tenaga Kerja+ Modal+ Bahan Baku/ Energi)}} \times 100 \%$	Total Keluaran Produk dibagi dengan total masukan tenaga kerja, modal, dan bahan baku dikali 100%	- BPS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Ketenagakerjaan
			Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola pekerja yang layak (UMR, BPJS, dll)	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ada}} \times 100\%$	kasus pereselisihan tenaga kerja yang masuk, dibagi	- BPS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Ketenagakerjaan
			Presentase produktivitas tenaga kerja yang ditempatkan (dalam/ luar negeri) mekanisme layanan antar kerja	%	50	50	60	60	70	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama penempatan Angkatan Kerja}}{\text{Tingkat Pengangguran Terbuka}} \times 100\%$	jumlah kerjasama penempatan angkatan kerja yang ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri, dibagi dengan Tingkat Pengangguran terbuka, dikali 100%	- BPS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Ketenagakerjaan
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu													
		3.2 Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian Kerakyatan	Presentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang mendukung Nilai Investasi	%	100	100	100	100	100	Dokumen Kebijakan yang menambah Nilai Investasi dalam Rupiah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	DPMPTSP	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		7.2 Meningkatnya kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparat	PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tmtang Pelayanan Publik	DPMPTSP	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4							5	6	7	8
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan												
	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat	7.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah sebagai wujud DIGITALISASI BIROKRASI	Indeks perencanaan pembangunan	%	90	90	90	90	90	60% capaian sasaran Pemkab + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan dihitung dengan formula 60%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah	Dokumen RKPDP	BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan kinerja sesuai target	%	90	90	90	90	90	$\frac{\text{Jumlah OPD yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	Rata-rata persentase kualitas dokumen perencanaan (memuat visi, misi, tujuan, program, indikator, kinerja utama dan target kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik	Laporan Monev SKPD	BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
10.	Inspektorat												
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI	7.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah sebagai wujud DIGITALISASI BIROKRASI	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan (rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti)	%	100	100	100	100	100	Jumlah rekomendasi yang telah di tindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%	Evaluasi tindak lanjut temuan APIP dan Eksternal di Lingkungan Pemkab Tana Tidung - Audit Inspektorat Kabupaten - Inspektorat Prov Kaltara - Ijren - BPKP Perwakilan - BPK	Laporan rekap PKPT semesteran Inspektorat	- Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
11. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan													
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal menuju KTT BERDAYA	3.1 Meningkatnya pemerataan Kapasitas Perekonomian Masyarakat	Produktifitas Padi	Ton	1996	1999	2002	2005	10010	$\frac{\text{Produktifitas Padi Tahun } n}{\text{Produktifitas Padi Tahun } n-1} \times 100\%$	Membandingkan produksi padi lokal (ton) yang dihasilkan dalam satu tahun di Kab.Tana Tidung dengan tahun sebelumnya	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERTANIAN
			Produktifitas Jagung	Ton	80	82	84	86	420	$\frac{\text{Produktifitas Jagung Tahun } n}{\text{Produktifitas Jagung Tahun } n-1} \times 100\%$	Membandingkan produksi jagung lokal (ton) yang dihasilkan dalam satu tahun di Kab.Tana Tidung dengan tahun sebelumnya	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERTANIAN
			Produktifitas Daging	Ton	380	400	420	440	2100	$\frac{\text{Produktifitas Daging Tahun } n}{\text{Produktifitas Daging Tahun } n-1} \times 100\%$	Membandingkan produksi daging lokal (ton) yang dihasilkan dalam satu tahun di Kab.Tana Tidung dengan tahun sebelumnya	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERTANIAN
			Jumlah Lahan yang Dikelola dengan Baik dalam penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Ha)	Ha	25	25	50	50	200	Jumlah Lahan yang Dikelola dengan Baik dalam penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Ha) dalam satu Tahun	Jumlah Lahan yang Dikelola dengan Baik dalam penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Ha) dalam satu Tahun	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERTANIAN
			Presentase Izin Usaha Pertanian yang Diawasi	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Pertanian Tahun } n}{\text{Jumlah Izin Usaha Pertanian Tahun } n-1} \times 100\%$	Membandingkan jumlah izin usaha pertanian satu tahun dengan tahun sebelumnya dikali 100%	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERTANIAN
			Presentase Kelompok Tani yang mengalami peningkatan kelas Kelompok	%	6	6	6	6	30	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Tahun } n}{\text{Jumlah Kelompok Tani Tahun } n-1} \times 100\%$	Mengukur produktivitas kelompok Tani tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikali 100%	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERTANIAN
			Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	885	890	895	900	4475	Jumlah Produksi Perikanan dalam satu tahun (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan dalam satu tahun (Ton)	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERIKANAN
			Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7620	7624	7629	7635	38149	Jumlah Perikanan Budidaya dalam Satu Tahun (Ton)	Jumlah Perikanan Budidaya dalam Satu Tahun (Ton)	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERIKANAN
			Konsumsi Ikan dalam satu Tahun	Kg/Kap/Thn	60	61	62	63	64	Jumlah Konsumsi Ikan dalam satu Tahun (Kg/Kap/Tahun)	Jumlah Konsumsi Ikan dalam satu Tahun kilogram per Kapita per Tahun	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PERIKANAN

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
			Presentase Pemeriksaan Keswan dan Kesmavet	%	2	2	2	2	10	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan keswan/kesmavet Tahun } n}{\text{Jumlah pemeriksaan keswan/kesmavet Tahun } n-1} \times 100\%$	sebagai upaya penurunan penyakit hewan/ternak tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Presentase ketersediaan pangan (Skor Neraca Bahan Pangan)	%	83.5	83.8	84	84.2	84.5	$\frac{\text{Produksi bahan pangan pokok tahun } (n)}{\text{Kebutuhan bahan pangan pokok tahun } (n)} \times 100\%$	Perhitungan Kosentasi produksi Bahan pokok dalam satu tahun. Bahan Pangan Pokok (12 item) = Beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng.	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
		Meningkatkan Food Security (Ketahanan Pangan Kabupaten)	Persentase Luas Lahan Yang Terkendali	%	20	20	20	20	100	$\frac{\text{Luas tanam / luas area tanam komoditi tanaman pokok tahun } (n)}{\sum \text{Luas tanam / luas area tanam tahun } (n)} \times 100\%$	Perbandingan luas tanaman/luas lahan pertanian/luas lahan unit pengamatan (komoditi) terhadap kelompoknya sehingga diketahui besaran sumbangan (share) hasil pengukuran suatu bagian data terhadap keseluruhan data yang sama. Data yang memiliki presentase besar menunjukkan pengaruh yang paling besar terhadap keseluruhan data tersebut/kelompok data tersebut.	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Presentase Jumlah Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	30% kinerja mutu dan keamanan pangan hasil pertanian + 30% kinerja mutu dan keamanan pangan hasil peternakan & perikanan + 40% kinerja ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan kinerja mutu dan keamanan pangan hasil pertanian: 100% dikurangi persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian - Perhitungan kinerja mutu dan keamanan pangan hasil peternakan & perikanan: (Jumlah unit usaha yang dijadikan target pemeriksaan dibagi dengan realisasi jumlah tipiring) ditambah (100% dikurangi realisasi persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan) dibagi dua. - Perhitungan kinerja ketersediaan pangan : Realisasi angka ketersediaan energi dibagi target akhir renstra, dikalikan 100% - Analisa neraca bahan makanan: peningkatan jumlah beras yang masuk dari luar wilayah Kab Tana Tidung, ke KTT 	- BPS - Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah												
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI	7.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah sebagai wujud	Presentase penyusunan dan Penetapan APBD yang tepat waktu	%	80	82	85	90	95	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menyusun RAPBD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Jumlah OPD yang telah menyusun RAPBD yang telah terverifikasi dibagi dengan seluruh jumlah OPD, dikali 100%	DPA dan DPPA SKPD	- Bidang Keuangan
			Presentase atas hasil Monitoring dana kas daerah atas pendapatan, pembiayaan, dan realisasi belanja	%	80	82	85	90	95	$\frac{\text{Jumlah Movev Kas Pendapatan, Pembiayaan, Realisasi}}{\text{Target yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	Laporan Movev SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SKPD	- Bidang Keuangan
			Presentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	%	80	82	85	90	95	$\frac{\text{Jumlah Dokumen LKPD OPD yang sesuai SAP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Permendagri 13 tahun 2006	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Bidang Keuangan
			Presentase penyusunan dan penyampaian Laporan OPD tepat waktu	%	80	82	85	90	96	$\frac{\text{Jumlah Laporan BMD OPD yang tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Laporan Movev SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Bidang Keuangan
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia												
1	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kualitas ASN Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80	82	85	86	90	Hasil penilaian profesionalisme ASN	Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019	Dokumen hasil penilaian KASN	Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
			Presentase ASN yang memiliki kompetensi / Indeks Kualitas ASN	%	40	40	40	40	40	50% persentase pemenuhan penataan ASN+ 20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian + 30% persentase kelulusan diklat	- Persentase pemenuhan penataan ASN dihitung dari jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100% - Persentase pelayanan administrasi kepegawaian dihitung dari jumlah penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100% - Persentase kelulusan diklat dihitung dari jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%	Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat	Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
			Persentase Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Proyeksi ASN dan Informasi}}{\text{Jumlah Target Tahun n}} \times 100\%$	Jumlah Proyeksi ASN dan Informasi kab Tana Tidung dibagi dengan Jumlah Target ASN, dikali 100%	BKPSDM	Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Pegawai
			Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	40	30	25	20	135	$\frac{\text{Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal}}{\text{Jumlah SDM Aparatur}} \times 100\%$	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal sesuai kualifikasi dibagi dengan Jumlah SDM Aparatur, dikali 100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Presentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Seluruh Pejabat Struktural}} \times 100\%$	Jumlah Pejabat Struktural Eselon II,III, dan IV yang mengikuti Pelatihan, dibagi Jumlah Seluruh Pejabat Struktural, dikali 100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
			Presentase ASN memiliki penilaian kinerja yang objektif	%	90	90	95	95	90	$\frac{\text{Jumlah ASN yang telah dinilai/ memiliki Penilaian SKP}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100\%$	Jumlah ASN yang telah dinilai/ memiliki Penilaian SKP, dibagi Jumlah Seluruh ASN, dikali 100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Pegawai
2	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI	7.2 Meningkatkan kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Nilai	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan ASN	Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan ASN	Dokumen hasil survei	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pengembangan Aplikasi kepegawaian yang dapat digunakan	Aplikasi	2	3	4	5	1	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dapat diakses	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dapat diakses	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Pegawai
			Presentase data ASN yang akurat	%	80	85	90	95	75	$\frac{\text{Jumlah Data ASN yang akurat}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100\%$	Presentase kebutuhan data ASN yang akurat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Pegawai
14 Dinas Lingkungan Hidup													
1	Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	5.1 Terwujudnya Ketahanan Kualitas Air	Presentase parameter kunci yang memenuhi baku mutu kualitas air	Persentase	80	80	80	80	80	$\frac{\text{Rata-rata komponen baku mutu kualitas air}}{\text{Standard baku mutu kualitas air}} \times 100\%$	- Klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 1. - Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq \text{Plj} \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < \text{Plj} \leq 5,0$ 3. Tercemar sedang jika $5,0 < \text{Plj} \leq 10,0$ 4. Tercemar berat jika $\text{Plj} > 10,0$.	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Luas Lahan yang tertutup vegetasi	Ha	15099	15099	15099	15099	15099	Luas Lahan (Satuan Ha) yang ditutup vegetasi	Luas Lahan (Satuan Ha) yang ditutup vegetasi	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
			Presentase Luas RTH yang tersedia	Persentase	1	1	1	1	1	$\frac{\text{Luas RTH yang tersedia}}{\text{Luas Lahan}} \times 100\%$	- Penghitungan RTH dilakukan dengan membanding luas RTH dengan luas wilayah administratifnya.	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
			Presentase parameter kunci yang memenuhi baku mutu kualitas udara	Persentase	80	80	80	80	80	$100 - ((50/0,9) \times (\text{Ratarata IEU}-0,1))$	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, dengan 7 (tujuh) parameter yakni PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan PM2.5.	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
		7.2	Meningkatkan Kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Jumlah Usaha/Kegiatan yang mendapatkan Proper Biru	Jumlah	3	3	3	3	$\frac{\text{Pelaku usaha Lingkungan yang taan izin}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha bidang Lingkungan}} \times 100\%$	- Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SOx dan NOx. - Metode pengambilan sampel dengan cara Passive Sampler (minimal 6 kali pengambilan sampel dengan pemaparan 7 hari, atau 3 kali pengambilan sampel)	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
			Presentase Volume Sampah yang tertangani	%	64,11	66,40	68,69	70,98	73,27	$\frac{\text{jumlah penduduk terlayani pengangkutan sampah}}{\text{jumlah penduduk kota}} \times 100\%$	- Data jumlah penduduk yang terlayani kegiatan pengangkutan sampah diperoleh dari rumus : jumlah sampah yang diangkut (liter/hari) dibagi jumlah timbulan sampah SNI Kabupaten (liter/jiwa/hari). - Timbulan sampah SNI Kabupaten = 2,65 liter/jiwa/hari. (0,025 m3) - Jumlah sampah yang diangkut diperoleh dari rumus : jumlah kendaraan x jumlah ritase x kapasitas kendaraan. - Jenis kendaraan pengangkutan sampah yang digunakan : dumptruck DLH, dumptruck swasta, armroll truck dan compactor truck.	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI	7.2	Meningkatkan Kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	Satuan	0,996	0,997	0,998	0,999	1	Rasio Jumlah Penduduk yang memiliki KTP sesuai dengan Target Tahun	Dokumen Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Presentase kepemilikan KIA	%	80	85	90	95	100	$\frac{\text{Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah usia Anak}} \times 100$	- Jumlah penduduk yang memiliki KTP - Jumlah penduduk wajib KTP - Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan - Jumlah KIA yang diterbitkan - Jumlah Anak	Dokumen Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	%	95	96	97	98	100	$\frac{\text{Persentase jumlah dokumen Akta Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}} \times 100$	Jumlah akta Kelahiran yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun, dikali 100%	Dokumen Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Presentase OPD/ Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	OPD	6	6	6	6	30	$\frac{\sum \text{Jumlah Pengguna website disdukcapil/ Jumlah kerjasama yang terlaksana}}{\text{Jumlah Pengguna website disdukcapil/ Jumlah kerjasama yang terlaksana}}$	Menghitung rata-rata jumlah pengunjung website /menggunakan layanan website Disdukcapil	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16	Satuan Polisi Pamong Praja												
1	Meningkatkan Konduktivitas Pembangunan Wilayah	8.1 Meningkatnya Perlindungan	Angka Kriminalitas (per 10.000 Penduduk)	-	5.86	5.64	5.43	5.21	5	Jumlah Kriminalitas per 10.000 penduduk	Jumlah Kriminalitas per 10.000 penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	33.33	41.66	50	58.33	66.66	30%Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase Kecamatan yang melaksanakan perlindungan masyarakat	(1) Hasil operasi penegakan Perda baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat. (2) Jumlah penanganan event; pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (3) Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil anggota PolPP yang memahami peraturan danyang lulus kesamaptaan. (4) Jumlah kampung yang memiliki anggota linmas pembentukan dan penumbuhan kampung panca tertib.	- Satuan Polisi Pamong Praja - Kecamatan	Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat
			Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	41.66	50	58.33	66.66	75	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran tahun (n-1) - Jumlah pelanggaran Perda tahun (n)}}{\text{Jumlah pelanggaran tahun (n)}} \times 100\%$	Jumlah pelanggaran tahun (n-1) dikurang jumlah pelanggaran Perda tahun (n) dibagi Jumlah pelanggaran tahun (n) dikali 100%	Data pelanggaran perda, Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
			Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	61.87	65.62	67.18	67.75	70.31	Jumlah Petugas Linmas yang dapat menjangkau kecamatan	Jumlah Petugas Linmas yang dapat menjangkau 5 kecamatan Kabupaten Tana Tidung	Data pelanggaran perda, Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
1	Meningkatkan Konduktivitas Pembangunan Wilayah	8.1 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Indeks mitigasi resiko sosial		160	155	150	145	140	50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi	Identifikasi Data dari BPBD	BPBD Kabupaten Tana Tidung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	1	1	1	1	5	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Perhitungan jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD Kabupaten Tana Tidung	- Bidang Penanggulangan Bencana
			Presentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana}}{\text{Jumlah Bencana Daerah Tahun n}} \times 100\%$	Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana dibagi data jumlah Bencana Daerah Tahun berjalan dikali 100%	BPBD Kabupaten Tana Tidung	- Bidang Penanggulangan Bencana - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
1	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	Presentase Penanganan potensi kerawanan konflik sosial yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)	%	100	100	100	100	100	Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi *100%	Data konflik bermitra dengan Kominda (Komunitas Intelejen Daerah)	Laporan FKUB / FPK setiap tahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan													
1	Meningkatkan Konduktivitas Pembangunan Wilayah	8.1 Meningkatkan Perlindungan Masyarakat	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi proteksi kebakaran+ 40 % response time	Penilaian indikator : - Ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran - Edukasi proteksi kebaran - Waktu Tanggap (Response time)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik	7.2 Meningkatkan Kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Indek Kepuasan Masyarakat	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
20 Dinas Komunikasi dan Informatika													
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI	7.1 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah sebagai wujud DIGITALISASI BIROKRASI	Presentase Pemanfaatan TIK	%	22	17	15	17	15	20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Pemanfaatan TIK : Pemanfaatan data - Jumlah data yang dimanfaatkan : Buku Statistik hasil kerjasama dengan BPS Tindak lanjut aduan : - Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam aduan Pemanfaatan teknologi informasi dan telematika : - Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi - Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV - Jumlah ruang publik free wifi - Jumlah ruang publik free CCTV - Jumlah aplikasi yang dibangun - Jumlah rencana aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Teknologi Informatika
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik	7.2 Meningkatkan Kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	Jumlah KIM per Kecamatan Tahun n Jumlah Target KIM per kecamatan Tahun n-1 x 100 %	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat per Kecamatan yang dibentuk, dibagi dengan jumlah Target KIM per kecamatan Tahun sebelumnya, dikali 100%	Informasi publik yang termuat di media massa lokal dan nasional	Bidang Komunikasi dan Kehumasan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025				
1	2	3	4						5	6	7	8
21 Dinas Perhubungan												
Menyediakan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas Menuju KTT TERANG dan KTT ADA	2.2 Meningkatnya jaringan listrik/ penerangan dan kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi sebagai wujud KTT TERANG	Jumlah Kecamatan yang terlayani transportasi umum	Kecamatan	2	2	2	5	5	Jumlah Kecamatan yang Terhubung Transportasi Darat/ Sungai $\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang Terhubung Transportasi Darat/ Sungai}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/ Kecamatan}} \times 100\%$	Jumlah Kecamatan yang Terhubung Transportasi Darat/ Sungai $\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang Terhubung Transportasi Darat/ Sungai}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/ Kecamatan}} \times 100\%$	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Presentase rambu- rambu yang berfungsi dengan baik	%	90	91	92	93	95	Jumlah Rambu- rambu yang berfungsi dengan baik per kecamatan $\frac{\text{Jumlah Rambu- rambu yang berfungsi dengan baik per kecamatan}}{\text{Jumlah Sebaran Rambu Lalu lintas per kecamatan}} \times 100\%$	Menghitung rambu- rambu lalu lintas yang tersedia di kecamatan yang berfungsi baik, dibagi dengan sebaran rambu lalu lintas di kecamatan, dikali 100%	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Presentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang datang dan berangkat		8	9	10	11	12	Jumlah Penumpang Berangkat dalam satu tahun $\frac{\text{Jumlah Penumpang Berangkat dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Penumpang datang dalam satu tahun}} \times 100\%$	menghitung jumlah penumpang keberangkatan dibagi dengan penumpang kedatangan dalam satu tahun, dikali 100%	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Jumlah angka Pelanggaran	pelanggaran	17	15	13	10	0	Jumlah angka pelanggaran lalu lintas dalam satu tahun	Jumlah angka pelanggaran lalu lintas dalam satu tahun	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana dan Keselamatan
		Jumlah kendaraan yang lulus uji KIR	Unit	150	160	170	180	190	Jumlah kendaraan yang lulus uji KIR dalam satu tahun	Jumlah kendaraan yang lulus uji KIR dalam satu tahun	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana dan Keselamatan
		Presentase layanan angkutan darat	%	82	84	86	88	0	Rata-rata jumlah kecamatan yang terhubung dengan angkutan darat	Rata-rata jumlah kecamatan se-Kabupaten Tana Tidung yang terhubung dengan angkutan darat	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Jumlah orang yang terangkut angkutan umum sungai/darat	Org	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	Jumlah penumpang angkutan sungai/darat dalam satu tahun	Jumlah penumpang angkutan sungai/darat dalam satu tahun	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal	Unit	0	11	0	12	13	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal per Tahun	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal per Tahun	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Jumlah orang yang melalui dermaga/ Bandara/ terminal pertahun	Orang	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000	Jumlah Orang yang melalui dermaga/ terminal Tahun n	Jumlah Orang yang melalui dermaga/ terminal Tahun n	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Presentase fasilitas perubungan yang berfungsi baik	%	91	92	93	94	95	Jumlah Fasilitas perhubungan yang berfungsi Baik $\frac{\text{Jumlah Fasilitas perhubungan yang berfungsi Baik}}{\text{Jumlah Fasilitas Perhubungan}} \times 100\%$	Menghitung fasilitas perhubungan yang tersedia di kecamatan yang berfungsi baik, dibagi dengan sebaran fasilitas di kecamatan, dikali 100%	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Prasarana dan Keselamatan
Presentase Layanan angkutan lau/ sungai	%	62	64	66	68	72	Jumlah Desa/ Kecamatan yang Terhubung Transportasi laut/ Sungai $\frac{\text{Jumlah Desa/ Kecamatan yang Terhubung Transportasi laut/ Sungai}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/ Kecamatan}} \times 100\%$	Jumlah Kecamatan yang Terhubung Transportasi Darat/ Sungai dibagi seluruh jumlah kecamatan, dikali 100%	- BPS - Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan													
1	Mewujudkan Masyarakat yang unggul dan berdaya saing menuju KTT PINTAR dan KTT SEHAT	1.1 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas layanan Pendidikan yang berkeadilan sebagai wujud KTT Pintar	Indeks Literasi Masyarakat	-	14	14,5	15	15,5	17	Indeks Literasi yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional / Provinsi	Data jumlah kunjungan seluruh layanan perpustakaan dihitung dari pengunjung 5 layanan yang tersedia, yaitu : - Pemerataan Layanan Perpustakaan - Ketercukupan Koleksi Buku untuk Wilayah Kab Tana Tidung) - Ketercukupan Tenaga Perpustakaan - Tingkat Kunjungan Perpustakaan - Jumlah Anggota Perpustakaan	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Orang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun (n) -	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Desa, TBM, dan Perpustakaan Sekolah dalam satu tahun	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Pendidikan	Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan
		7.2 Meningkatnya kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Indek Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat
23 Sekretariat DPRD													
1	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI	7.2 Meningkatnya kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda}}{\text{Jumlah Raperda dalam propemperda}} \times 100 \%$	jumlah Raperda yang disahkan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah propemperda, dikali 100%	Rekap jumlah perda yang sahkan	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat}} \times 100 \%$	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD, dibagi dengan jumlah Pengaduan Masyarakat dikali 100%	Rekap Jumlah Pengaduan Masyarakat	Bagian fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang Baik	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Nilai survey kepuasan anggota DPRD	Penilaian survei kepuasan anggota DPRD (seluruhnya 40 orang) dengan metode pengisian kuisioner.	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN
				SATUAN	2022	2023	2024	2025	TARGET AKHIR				
1	2	3	4							5	6	7	8
24	Sekretariat Daerah												
1	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI	7.1 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah sebagai wujud DIGITALISASI BIROKRASI	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71	72	73	74	75	Hasil Penilaian PMPRB / Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB	Hasil Penilaian PMPRB / Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB	Dok. Hasil PMPRB / Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	- Sekretariat Daerah
			Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah Yang Berkualitas	%	100	100	100	100	100	Jumlah produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum $\frac{\text{Jumlah produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum}}{\text{Jumlah usulan produk hukum daerah}} \times 100\%$	Jumlah produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum yang telah di Harmonisasi kedalam produk hukum, dibagi dengan Jumlah usulan produk hukum daerah,	Rekapitulasi produk hukum daerah	- Bagian Hukum
			Nilai Indeks Kelembagaan	-	P4	P4	P4	P4	P4	Hasil Penilaian Struktur Organisasi/ Kelembagaan Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	Hasil Penilaian Struktur Organisasi/ Kelembagaan Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	- Bagian Organisasi	- Bagian Organisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,5	82	82,5	83	83,5	Hasil Survey pelayanan publik pada SKPD secara Internal / Eksternal	Hasil Survey pelayanan publik pada SKPD secara Internal / Eksternal	Dok. Hasil survey	- Bagian Organisasi
			Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	Hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	- Bagian Organisasi	- Bagian Organisasi
			Inovasi Pelayanan Lolos Penilaian Nasional	Jumlah	2	2	3	3	6	Hasil Penilaian Nasional Inovasi Pelayanan Publik	Hasil Penilaian Nasional Inovasi Pelayanan Publik	Dok. Hasil penilaian	- Bagian Organisasi
			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	%	100	100	100	100	100	Jumlah pelayanan KDH/WKDH pada tahun n yang disediakan $\frac{\text{Jumlah pelayanan KDH/WKDH pada tahun n yang disediakan}}{\text{Jumlah pelayanan KDH/WKDH pada tahun n yang berjalan dikali 100\%}}$	Jumlah pelayanan KDH/WKDH pada tahun n yang disediakan dibagi jumlah pelayanan KDH/WKDH pada tahun berjalan dikali 100%	Rekapitulasi Pelayanan KDH WKDH	- Bagian Umum dan Protokol
			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	Kinerja Pengendalian Pembangunan diperoleh dengan formula penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja x100%, kemudian hasilnya dikalikan bobot 70% - Kinerja Layanan Pengadaan diperoleh dengan formula : ((persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu) dikalikan bobot 60%) ditambah ((Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%) dikalikan bobot 40%)	Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung (SIMPPD)	- Bagian Administrasi Pembangunan
			Indeks Pengelolaan Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Cukup	Cukup	Cukup	BAIK	Baik	Indeks Tata Kelola yang dikeluarkan oleh LKPP	Indeks Tata Kelola yang dikeluarkan oleh LKPP	LKPP	- Bagian Administrasi Pembangunan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Peringkat LPPD	Predikat	ST	ST	ST	ST	ST	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Realisasi indikator EKPPD diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kemdagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab Tana Tidung. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai 2 variabel, yaitu indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. $\text{Indeks hasil EKPPD} = \text{ICK} + \text{IKM}$ Pengelompokan prestasi capaian kinerja: - Skor $3 < \text{ST} \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST) - Skor $2 < \text{T} \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T) - Skor $1 < \text{T} \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S) - Skor $0 < \text{R} \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R)	KEMENDAGRI	- Bagian Pemerintahan
	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal menuju KTT BERDAYA	3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian Kerakyatan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	70	75	80	90	100	$\frac{\text{Jumlah sengketa Tanah}}{\text{Jumlah Sengketa Tanah yang berhasil di Mediasi}} \times 100 \%$	Jumlah sengketa tanah se-Kab Tana Tidung dibagi dengan jumlah sengketa Tanah yang berhasil di Mediasi, dikali 100%	Data Regulasi Pemerintahan desa	- Bagian Pemerintahan
			Persentase Penerima Hibah Bansos yang sesuai dengan hasil Verifikasi	%	60	70	80	90	100	$\frac{\text{Jumlah Bantuan Hibah Bansos yang masuk tahun n}}{\text{Jumlah Bantuan Hibah yang lolos verifikasi}} \times 100 \%$	jumlah usulan hibah bansos yang masuk dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah bantuan hibah yang lolos verifikasi, dikali 100%	Data Hibah Bansos	- Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
			Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati di bidang Kesejahteraan Masyarakat}}{\text{Jumlah policy brief di bidang kesejahteraan masyarakat yang ada}} \times 100 \%$	Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati di bidang Kesejahteraan Masyarakat dibagi dengan Jumlah policy brief di bidang kesejahteraan masyarakat yang ada, dikali 100%	Dok. Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat	- Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
25	Kecamatan												
1	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI	7.2 Meningkatnya kualitas layanan publik sebagai wujud KTT MELAYANI	Indek Kepuasan Masyarakat	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Seluruh Kecamatan
			Persentase Kelompok Masyarakat atau Kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	%	29	57	85	100	100	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat}} \times 100 \%$	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa yang terlibat dalam kelompok masyarakat, dibagi dengan jumlah seluruh masyarakat usia 25-50 Tahun, dikali 100%	Kecamatan Sesayap	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR					PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	METODELOGI	SUMBER DATA	KETERANGAN	
				SATUAN	2022	2023	2024	2025					TARGET AKHIR
1	2	3	4						5	6	7	8	
			Presentase Kelompok Ormas yang ikut kegiatan pemberdayaan	%	78	80	80	85	90	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Ormas yang aktif}}{\text{Jumlah Ormas yang terdaftar}} \times 100\%$	Jumlah Kelompok Ormas yang terlibat dalam kelompok masyarakat, dibagi dengan jumlah seluruh Ormas, dikali 100%	Kecamatan Sesayap Hilir	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Jumlah Kelompok organisasi masyarakat yang aktif	Kelompok	3	4	4	5	5	Jumlah kelompok Organisasi yang aktif dalam satu tahun	Jumlah kelompok Organisasi yang aktif dalam satu tahun	Kecamatan Tana Lia	Kecamatan Tana Lia
			Jumlah Desa yang status desanya meningkat	Desa	1	1	2	2	3	Jumlah Desa yang statusnya meningkat	Jumlah Desa yang statusnya meningkat dari status ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan	Kecamatan Tana Lia	Kecamatan Tana Lia
			Indeks Desa Membangun di Kecamatan Betayau	%	50	55	60	65	65	$\frac{\text{IKE} + \text{IKS} + \text{IKL}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$	Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi dari 6 Desa Kecamatan Betayau.	Kecamatan Betayau	Kecamatan Betayau
			Presentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	60	65	65	70	75	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pembinaan \& Pengawasan Desa}}{\text{Jumlah Seluruh Kegiatan}} \times 100\%$	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa ditambah Nilai evaluasi Perkembangan Kecamatan dibagi 2	Kecamatan Betayau	Kecamatan Betayau
			Jumlah Desa dengan status Desa Baik dalam pengelolaan pemerintahan Desa	Desa	1	1	2	2	3	Jumlah Desa Dengan Status Desa Baik	Jumlah Desa yang statusnya meningkat dari status ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan	Kecamatan Muruk Rian	Kecamatan Muruk Rian
			Presentase Pembinaan dan Pengawasan	%	70	75	80	85	100	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan \& Pengawasan Desa}}{\text{Jumlah Seluruh Desa di Kec. Tana Lia}} \times 100\%$	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan & Pengawasan Desa, dibagi Jumlah Seluruh Desa di Kec. Tana Lia, dikali 100%	Kecamatan Muruk Rian	Kecamatan Muruk Rian

DITETAPKAN DI : TIDENG PALE
PADA TANGGAL :

BUPATI TANA TIDUNG

HX

IBRAHIM ALI

